

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir tahun anggaran 2023 dapat diselesaikan dan disampaikan dalam upaya memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 ini. Laporan ini menyajikan gambaran tentang capaian kinerja pada Dinas Koperasi dan UMKM. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya.

Dengan demikian diharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2023 ini lebih menggambarkan adanya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir.

Bagansiapiapi, Februari 2024

KEPALA DINAS KOPERASI DAN UMKM
KABUPATEN ROKAN HILIR,



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Ringkasan Eksekutif	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum Organisasi	1
B. Isu – Isu Strategis	1
C. Struktur Organisasi.....	1
D. Sistematika Penyajian	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
A. Rencana Strategis	10
B. Rencana Kinerja	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	16
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	16
B. Analisis dan Evaluasi Kinerja Sasaran	18
C. Realisasi Anggaran.....	26
BAB IV PENUTUP	38
LAMPIRAN I : Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) Tahun Anggaran 2023	39
LAMPIRAN II : Pengukuran Kinerja Sasaran (PPS) Tahun Anggaran 2023	44
LAMPIRAN III : Rencana Kinerja Tahun 2023.....	45
LAMPIRAN IV : Penja Eselon.....	46
LAMPIRAN V : LHE	47
LAMPIRAN VI : E – Monev TW 4	48
LAMPIRAN VII : SK IKU	53

RINGKASAN EKSEKUTIF

Terselenggaranya *good governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan akuntabel sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dengan dilandasi pemikiran tersebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir disusun dengan menyajikan capaian kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada tahun anggaran 2023 yang merupakan pelaksanaan amanah yang diemban oleh organisasi. Laporan ini juga merupakan kebutuhan kami dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir tahun ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan dalam bidang pembinaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Keberhasilan di bidang pembinaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah tentunya bukan hanya keberhasilan dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah semata, tetapi juga menggambarkan keberhasilan seluruh lembaga pemerintahan, dukungan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang terkait serta partisipasi masyarakat secara umum. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang bergerak dalam usaha ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan UMKM merupakan tujuan utama dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir. Beberapa keberhasilan yang dapat antara lain adalah :

1. Peningkatan kinerja pelayanan publik terutama di bidang konsultasi mengenai perkoperasian dan UMKM. Muara dari perbaikan pada aparatur negara adalah adanya peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat. Sangat disadari, bahwa peningkatan kinerja pelayanan ini masih sangat terbatas, namun setidaknya hal ini

telah menggambarkan adanya upaya nyata dalam rangka menjalankan salah satu fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

2. Terbinanya koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir baik melalui pembinaan langsung maupun melalui diklat yang bertujuan untuk peningkatan produktivitas koperasi dan UMKM yang nantinya diharapkan dapat bersaing dalam pasar global.
3. Tersusunnya Data Keragaan Koperasi dan UMKM di Kabupaten Rokan Hilir yang diharapkan nantinya dapat membantu dalam melakukan pembinaan – pembinaan serta informasi mengenai perkoperasian di Kabupaten Rokan Hilir.

Dari beberapa sasaran yang telah tercapai tersebut, masih terdapat perbedaan dengan kondisi yang diharapkan oleh masyarakat. Hal ini terlihat pada indikator kinerja yang digunakan pada pencapaian sasaran ini adalah pada tingkat *output*, sedangkan yang diharapkan masyarakat adalah pada tingkat *outcome*. Walaupun sudah lebih baik dari tahun sebelumnya, tetapi organisasi belum sepenuhnya mampu secara tegas mendefinisikan indikator kinerja *outcome* untuk seluruh sasaran yang ada dan sesuai dengan kondisi yang diharapkan oleh masyarakat. Dalam tahun mendatang tentunya akan lebih disempurnakan lagi perumusan indikator keberhasilan yang menggambarkan kondisi nyata yang diharapkan masyarakat.

Demikianlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah untuk Dinas Koperasi dan UMKM tahun anggaran 2023 ini kami susun untuk menjadi gambaran pelaksanaan kegiatan.

Bagansiapiapi, Februari 2024

KEPALA DINAS KOPERASI DAN UMKM
KABUPATEN ROKAN HILIR,



BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir merupakan salah satu unsur Pemerintah di Kabupaten Rokan Hilir dalam rangka membantu tugas daerah, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir No. 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir.

B. Isu-Isu Strategis

Dalam melaksanakan Visi dan Misi Pemerintah Daerah, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir mendukung terwujudnya Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir yang tertuang dalam rencana strategis yang berdasarkan atas isu – isu strategis yang meliputi :

1. Pengurus / pengelola koperasi masih perlu terus ditingkatkan lagi, baik dalam hal organisasi, manajerial maupun pengetahuan tentang perkoperasian dan wisausaha.
2. Penguasaan informasi pasar seta perluasan pemasaran produk.
3. Peningkatan etos kerja koperasi.
4. Mencari tenaga teknis untuk membina koperasi agar berkembang
5. Mengoptimalkan koperasi secara nyata.

C. Struktur Organisasi

1. Tugas Pokok

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir dan Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir. Bahwa Rencana Strategis Satuan Kerja

Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir yang telah disusun sebagai target kinerja setiap tahunnya, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir mempunyai tugas dan fungsi untuk membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan penunjang dibidang Koperasian dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang meliputi :

- a) Melaksanakan urusan Pemerintah Kabupaten berdasarkan asas otonomi dan pembantuan dibidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- b) Pengorganisasian, pelayanan umum dan teknis, pengendalian, pembinaan dan bimbingan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi, pelaksanaan lapangan, pembiayaan, penelitian dan pengkajian, serta pelaporan.

2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor : 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir.

- a) Kepala Dinas
- b) Sekretariat
- c) Bidang Koperasi
- d) Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah
- e) Bidang Kelembagaan
- f) UPT

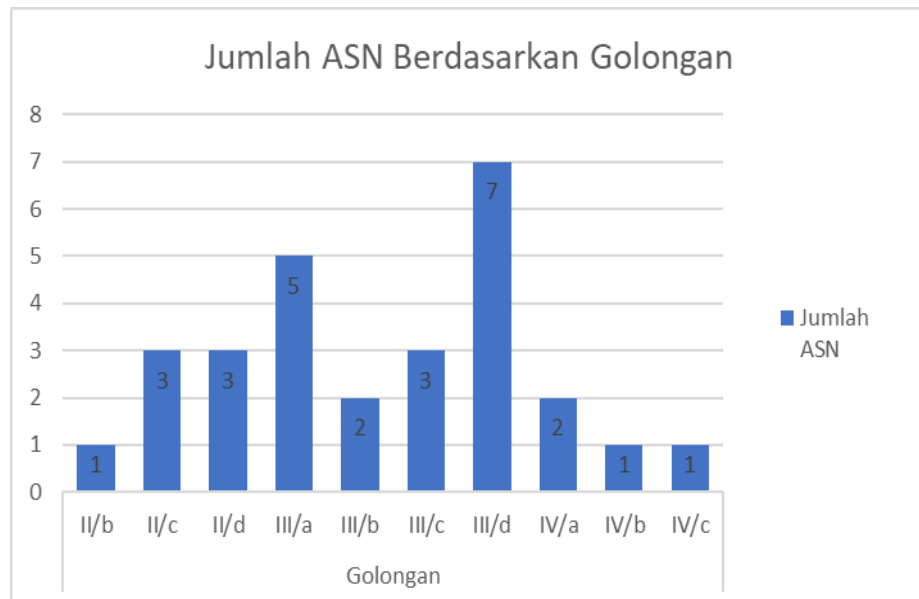
Jumlah ASN yang bertugas di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir tahun 2023 berdasarkan tingkat Pendidikan dapat dilihat pada grafik yang disajikan dibawah, sebagai berikut :

Grafik I.1 Jumlah ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan.



Untuk jumlah ASN yang bertugas di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir tahun 2023 berdasarkan tingkat Golongan sebagai berikut :

Grafik I.2 Jumlah ASN Berdasarkan Golongan.



Sedangkan jumlah ASN yang bertugas di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir tahun 2023 berjumlah 28 orang dengan jumlah ASN wanita sebanyak 17 orang dan ASN laki-laki sebanyak 11

orang, dan untuk ASN yang menduduki jabatan berdasarkan tingkat Eselon, antara lain :

- a) Eselon II berjumlah 1 orang
- b) Eselon III berjumlah 4 orang
- c) Eselon IV berjumlah 1 orang

Sekretariat Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan kesekretariatan dan merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan. Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Fasilitasi penyusunan konsep berkaitan pedoman dan petunjuk teknis tentang administrasi, produser kerja, koordinasi dan mekanisme hubungan kerja;
- 2) Pengkoordinasian penyusunan program kerja dengan berpedoman kepada program kerja tahunan yang lalu sesuai dengan petunjuk pimpinan;
- 3) Penyelenggaraan hubungan masyarakat baik internal maupun eksternal;
- 4) Penganalisaan kebijakan / program – program kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir yang akan disusun menjadi program kerja dinas;
- 5) Penghimpunan peraturan perundang – undangan, petunjuk dan pedoman kerja, buku – buku, bulletin / majalah dan bahan lainnya di bidang kepegawaian, hubungan masyarakat, keuangan dan perencanaan program;
- 6) Pengkoordinasian permasalahan tentang rencana kerja, ketatausahaan, hubungan masyarakat, keuangan perencanaan program serta perlengkapan;
- 7) Pengevaluasian pelaksanaan tugas sub bagian melalui koordinasi dan evaluasi terhadap data yang masuk untuk bahan kajian dan pembinaan serta penyusunan perencanaan kedepannya;

- 8) Penyelenggaraan urusan pekerjaan dan kegiatan tata usaha, hubungan masyarakat, umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan program serta perlengkapan;

Bidang Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas dan tanggung jawab menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan penyediaan dukungan kerjasama, bantuan dalam rangka pembinaan dan pengembangan Perkoperasian dan Usaha Koperasi di daerah. Bidang Koperasi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Perumusan rencana dan program operasional pembinaan koperasi;
- 2) Penyusunan pedoman penyuluhan tentang kebijakan usaha koperasi;
- 3) Penjabaran petunjuk teknis pembinaan koperasi;
- 4) Pelaksanaan koordinasi dengan unit lain dan instansi sectoral terkait dalam rangka pembinaan koperasi;
- 5) Pengevaluasian hasil penelaahan Bidang Koperasi tentang permohonan bantuan koperasi untuk pengembangan usaha;
- 6) Pemantauan pelaksanaan perkembangan pembinaan usaha koperasi;
- 7) Pengevaluasian laporan kegiatan dan pembinaan usaha koperasi;
- 8) Pengkoordinasian penyusunan program kerja di Bidang Koperasi, merumuskan kebijakan teknis pembinaan, pengembangan, pemberdayaan dan pengawasan koperasi;
- 9) Pengkoordinasian dan mengadakan rapat berkala dalam rangka pelaksanaan tugas;
- 10) Pelaksanaan hubungan kerjasama dengan unit kerja instansi lainnya dalam rangka pengembangan koperasi;
- 11) Penyusunan laporan pelaksanaan tugas bidang;
- 12) Pelaporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi;

Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas dan tanggung jawab menyelenggarakan urusan,

pekerjaan dan kegiatan penyediaan dukungan kerjasama, bantuan dalam rangka peningkatan peranan dan kemampuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Bidang UMKM mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) Penyiapan dan penyusunan kebijakan teknis dalam pembangunan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- 2) Fasilitas peningkatan usaha kerjasama Pengusaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan pihak Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
- 3) Penyiapan bahan penyusunan pedoman dalam pengembangan pemasaran produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- 4) Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pembinaan dan bimbingan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Rokan Hilir;
- 5) Pengevaluasian pelaksanaan program pengembangan, pembinaan dan bimbingan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- 6) Pengkoordinasian rapat staf dalam rangka pelaksanaan tugas di Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- 7) Pelaksanaan hubungan kerjasama dengan unit kerja dan instansi lainnya;
- 8) Pelaporan pelaksanaan tugas bidang;
- 9) Pelaporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi;

Bidang Kelembagaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok, fungsi dan tanggungjawab menyelenggaraan urusan, pekerjaan dan kegiatan penyediaan dukungan terhadap Kelembagaan Koperasi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang UMKM mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) Pekasanaan hubungan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan penyuluhan perkoperasian dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

- 2) Pengkoordinasian pengumpulan, penyusunan dan pengolahan bahan penyuluhan usaha simpan pinjam serta Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- 3) Pengkoordinasian, pembimbingan / pengarahan metode dan melaksanakan program penyuluhan tentang Undang – Undang / Peraturan dan kebijakan Pemerintah yang terkait dengan pembinaan dan pengembangan koperasi simpan pinjam, permodalan dan jasa keuangan, akuntabilitas koperasi dan promosi;
- 4) Pelaksanaan penilaian kebutuhan modal usaha bagi koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- 5) Pelaksanaan penilaian terhadap akuntabilitas koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- 6) Pengkoordinasian rapat berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tuags;
- 7) Pelaporan pelaksanaan tugas bidang;
- 8) Pelaporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi;

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah mengalami sedikit permasalahan khususnya pada sektor SDM atau ASN yang bertempat tugas di Dinas Koperasi dan UMKM. Ada beberapa jabatan fungsional yang masih kosong dan kekurangan staf di beberapa bidang serta minimnya sarana prasana kantor terutama komputer dan printer sehingga mengurangi hasil kinerja dari suatu bidang bahkan mempengaruhi kinerja dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir.

D. Sistematika Penyajian

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

Bagian ini menjelaskan tugas pokok, wewenang dan fungsi dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir.

B. Isu-isu Strategis

Uraian tentang kebijakan-kebijakan pokok dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir dibahas pada bagian ini.

C. Struktur Organisasi

Struktur organisasi diuraikan pada bagian ini sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir.

D. Sistematika Penyajian

Dalam sistematika penyajian diuraikan bagaimana tata letak dan urutan serta sifat dari penyusunan Lakip Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

1. Visi

Bagian ini menguraikan secara ringkas visi Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

2. Misi

Bagian ini menjelaskan secara ringkas misi Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Tujuan, Sasaran dan Cara Pencapaian

Uraian tentang tujuan, sasaran dan cara pencapaian atas visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir dijelaskan pada bagian ini.

B. Rencana Kinerja

1. Proses Penyusunan Rencana Kinerja Tahun 2023.

Penjelasan atas sasaran kinerja tahun 2023 pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir diuraikan dalam bagian ini.

2. Penetapan Target Kinerja

Penetapan Target Kinerja diuraikan dalam pembahasan ini.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja atas kegiatan tahun 2023 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir dijelaskan pada bagian ini.

B. Analisis dan Evaluasi Kinerja Sasaran

Analisis dan evaluasi kinerja sasaran diuraikan pada bagian ini.

C. Realisasi Anggaran

Penjelasan terhadap realisasi anggaran atas pelaksanaan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir tahun 2023 diuraikan dalam bagian ini.

BAB IV PENUTUP

Kesimpulan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

1. Visi

Pernyataan Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir yang hendak diwujudkan berikut ini;

“MENUJU ROKAN HILIR YANG MAJU, RELIGIUS DAN BERBUDAYA BERBASIS INFRASTRUKTUR DAN PEREKONOMIAN YANG HANDAL”

Visi Kabupaten Rokan Hilir dalam masa pembangunan selama kurun waktu 2021-2026 terdiri dari kata maju, religius, berbudaya, infrastruktur dan perekonomian dengan makna sebagai berikut :

a) Maju

Bermakna dapat dimaknakan sebagai suatu kondisi Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir yang unggul dan beradab.

b) Religius

Bermakna dapat dimaknakan sebagai suatu terciptanya masyarakat Kabupaten Rokan Hilir yang berlandaskan pada nilai – nilai keagamaan.

c) Berbudaya

Bermakna dapat dimaknakan sebagai suatu kondisi Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir yang memiliki pikiran dan akal budi yang maju serta senantiasa memperhatikan adat istiadat tradisi dan kearifan lokal.

d) Infrastruktur

Bermakna dapat dimaknakan sebagai terciptanya aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur untuk mewujudkan kelancaran dan pemerataan pembangunan di Kabupaten Rokan Hilir.

e) Perekonomian

Bermakna dapat dimakanakan sebagai suatu kondisi kemampuan daerah Kabupaten Rokan Hilir yang mapan didukung dengan pertumbuhan ekonomi yang adil dan Makmur untuk kesejahteraan masyarakat.

2. Misi

Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka di tetapkan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir, sebagai berikut ini :

a) Mewujudkan Aksesibilitas dan Konektivitas Infrastruktur antar Wilayah untuk Mewujudkan Pemerataan Pembangunan di Rokan Hilir.

Misi ini berorientasi untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur jalan antar wilayah melalui peningkatan luas dan Panjang akses jalan, jembatan dan pelayanan transportasi antar daerah di Kabupaten Rokan Hilir.

b) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berbudaya dan Berdaya Saing dengan Berbasis Nilai-Nilai Religi

Misi ini berorientasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Rokan Hilir yang berdaya saing, unggul, berbudaya berlandaskan iman dan taqwa melalui peningkatan kerukunan umat beragama.

c) Meningkatkan Mutu dan Layanan Kesehatan yang Berkualitas kepada Masyarakat Rokan Hilir

Misi ini berorientasi untuk meningkatkan kualitas dan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kabupaten Rokan Hilir.

d) Memajukan Sektor Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Pertanian, Perikanan dan Ekonomi Kreatif) yang terencana dan Berkelanjutan

Misi ini berorientasi untuk memajukan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi dan kearifan lokal Kabupaten Rokan Hilir dari sektor pertanian, perikanan dan Ekonomi Kreatif yang berkelanjutan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

e) Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, Efektif dan Efisien berbasis Teknologi

Misi ini berorientasi untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir yang baik efektif, efisien dan bersih dari KKN berbasis Teknologi serta analisis kebutuhan pegawai daerah berdasarkan kemampuan dan kebutuhan daerah.

Mengacu pada pernyataan visi dan misi tersebut di atas, maka Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, Mikro dan Menengah termasuk pada Misi ke 4 yang berbunyi “Memajukan Sektor Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Pertanian, Perikanan dan Ekonomi Kreatif) yang terencana dan berkelanjutan” dan Misi ke 5 yang berbunyi “Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, Efektif dan Efisien berbasis Teknologi” sesuai dengan Tupoksi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir.

3. Tujuan, Sasaran dan Cara Pencapaian

Adapun tujuan adalah merupakan implementasi dari pernyataan visi dan misi yang harus konsisten dengan tugas dan fungsi suatu organisasi, oleh karena itu indikator kinerja tujuan harus dapat mencerminkan apa yang akan dicapai. Dengan demikian berpengaruh pada cita-cita yang telah ditetapkan dalam visi dan misi.

Tujuan pembangunan koperasi dan UMKM adalah sebagai berikut :

- a) Terwujudnya Koperasi yang Maju dan Modern;
- b) Terwujudnya UMKM Berdaya Saing Global;
- c) Meningkatkan Tata Kelola Administrasi Guna Menunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas KUMKM

Sasaran Pembangunan Koperasi dan UMKM adalah sebagai berikut :

- a) Meningkatnya Kualitas Koperasi;
- b) Meningkatnya Produktivitas Koperasi;
- c) Meningkatnya UMKM yang Mempunyai Legalitas dan Bersertifikat;
- d) Meningkatnya Kuantitas (jumlah) UMKM;
- e) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas KUMKM.

Sasaran kinerja merupakan penjabaran lebih lanjut dari rencana strategis untuk suatu tahun tertentu yang direncanakan pada awal tahun dan merupakan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan.

B. Rencana Kinerja

Rencana kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir untuk tahun 2023 merupakan komitmen yang harus dilaksanakan oleh setiap anggota organisasi di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026.

1. Proses Penyusunan Rencana Kinerja Tahun 2023

Proses penyusunan rencana kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan tahapan-tahapan berikut ini:

a) Penetapan Sasaran Strategis

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir mengidentifikasi sasaran strategis yang ingin dicapai tahun 2023 seperti dijelaskan dalam rencana strategis, dengan memperhatikan anggaran yang tersedia tahun 2023. Sasaran strategis ini meliputi indikator kinerja yang akan dijadikan tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Untuk lebih jelasnya dalam dilihat pada Lampiran II.

b) Penetapan Program

Berdasarkan informasi yang tercantum dalam Lampiran I Pengukuran Kinerja Kegiatan diidentifikasi program-program yang akan dilaksanakan tahun 2023 untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

c) Penetapan Kegiatan

Untuk masing-masing program yang akan dilaksanakan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir menetapkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan agar sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat dicapai dalam tahun yang bersangkutan. Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan harus diidentifikasi indikator yang diharapkan sehingga pelaksanaannya mengarah pada pencapaian sasaran dan tujuan.

2. Penetapan Target Kinerja

Penetapan Target Kinerja merupakan salah satu faktor yang menjadi tolak ukur atau penilaian keberhasilan dari suatu organisasi perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

a) Indikator Kinerja Utama

Sebagai bentuk komitmen organisasi, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir menetapkan target kinerja (kuantitatif) untuk seluruh indikator kinerja, baik untuk tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan. Dalam rangka untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir beserta jajarannya menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang akan dicapai dengan 6 (enam) indikator kinerja utama. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.1 Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi dan UMKM

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE -				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terwujudnya Koperasi yang Maju dan Modern	Meningkatnya kualitas koperasi	Persentase koperasi sehat	7.74%	7.99%	8.47%	8.95%	9.68%
			Persentase koperasi aktif	78.54%	79.71%	81.39%	83.33%	85.50%
		Meningkatnya produktivitas koperasi	Jumlah omzet usaha (Rupiah)	Rp. 145 M	Rp. 147 M	Rp. 151 M	Rp. 158 M	Rp. 160 M
2	Terwujudnya UMKM Berdaya Saing Global	Meningkatnya UMKM yang berdaya saing	Jumlah UMKM yang mempunyai legalitas dan sertifikat setiap tahunnya (Unit)	65	70	72	75	80
			Jumlah UMKM (Unit)	24.003	25.003	26.003	27.003	28.003
3	Meningkatkan Penyelenggaraan Daerah yang Bersih, Transparan dan Akuntabel	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP OPD	BB	BB	BB	BB	BB

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir.

b) Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang memuat tugas dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Adanya perjanjian kinerja membuat terbentuklah komitmen antara penerima manah dan kesepakatan dengan pemberi amanah yang bertujuan untuk mengukur kinerja berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang dari penerima. Berikut tabel dari perjanjian kinerja pejabat Eselon II Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir.

Tabel II.2 Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon II.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	7,99%
		Persentase Koperasi Aktif	79,71%
2.	Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Jumlah Omzet Usaha (Rupiah)	Rp. 147 M
3.	Meningkatnya UMKM yang berdaya saing	Jumlah UMKM yang mempunyai Legalitas dan Sertifikat setiap tahunnya (Unit)	70 Unit
		Jumlah UMKM (Unit)	25.003 Unit
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP OPD	BB

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir.

Dalam mencapai dan mewujudkan Indikator Kinerja Tahun 2023 yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon II, Dinas Koperasi dan UMKM didukung dengan anggaran untuk pelaksanaan program / kegiatan sebesar Rp. 6.445.223.496 dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp. 6.214.775.991,- (96,42%) .

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan program / kegiatan yang sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misinya. Dalam tahun anggaran 2023 pengukuran kinerja yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir meliputi pengukuran kinerja atas capaian kinerja sasaran strategis dan pengukuran kinerja kegiatan. Pengukuran kinerja sasaran strategis merupakan capaian yang dihasilkan dengan membandingkan rencana indikator kinerja, sasaran strategis yang direncanakan dengan realisasi indikator kinerja sasaran strategis yang dapat dicapai. Pengukuran kinerja kegiatan dilakukan dengan membandingkan indikator *input*, *output*, dan *outcome* yang direncanakan dengan indikator *input*, *output*, dan *outcome* yang dapat dicapai dalam tahun yang bersangkutan.

Pada tahun anggaran 2023, sasaran strategis yang akan dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir meliputi 4 (empat) sasaran strategis yang akan dicapai dengan 6 (enam) indikator kinerja utama. Pengukuran kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir mengacu pada Peraturan MENPAN No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

Secara umum, indikator kinerja dan kegiatan yang telah dilakukan sudah dapat dirumuskan sampai dengan indikator kinerja outcome dari masing-masing kegiatan. Walaupun demikian ada juga permasalahan yang dihadapi dalam menghitung capaian kinerja adalah berkaitan dengan data kinerja yang mendukung capaian indikator outcome yang dipakai. Oleh karena itu beberapa kegiatan yang sulit dalam menentukan data kerjanya, pengukuran pencapaian kinerja dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan satuan persentase dengan dasar pemikiran bahwa kegiatan tersebut telah dirasakan manfaatnya.

Sementara itu indikator manfaat (benefit) dan dampak (impact) belum dapat dilakukan pengukuran pencapaian kinerja, karena menurut hemat kami hal itu belum dapat dilakukan/dilihat pada tahun yang bersamaan dengan tahun pelaksanaan kegiatan. Disamping itu, diperlukan tenaga dan dana yang cukup besar untuk dapat melakukan pengumpulan data pengukuran benefit dan impact.

Indikator Kinerja Utama merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh dan menggambarkan tugas, peran dan fungsi organisasi tersebut. Sebagai langkah utama untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kinerja organisasi maka perlu dilaporkan Indikator Kinerja yang paling utama atau disebut dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dari beberapa indikator yang ada. Capaian Indikator Kinerja Utama diharapkan secara proporsional dapat memberikan gambaran sejauh mana organisasi dapat mencapai kinerjanya.

**Tabel III.1 Pengukuran Kinerja Dinas Koperasi dan UMKM
Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023.**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Kualitas Koperasi Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	7.99%	6,48%	81.10%
		Persentase Koperasi Aktif	79.71%	89,68%	100%
2.	Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Jumlah Omzet Usaha (Rupiah)	Rp. 147 M	Rp. 186.531.077.600	100%
3.	Meningkatnya UMKM yang berdaya saing	Jumlah UMKM yang mempunyai Legalitas dan Sertifikat setiap tahunnya (Unit)	70	87	100%
		Jumlah UMKM (Unit)	25.003	35.068	100%
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP OPD	BB	BB	100%

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir.

B. Analisis dan Evaluasi Kinerja Sasaran

Analisis dan evaluasi kinerja akan dilakukan terhadap sasaran-sasaran ataupun target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir. Evaluasi terhadap capaian-capaian kinerja merupakan sebuah tuntutan mengingat pesatnya dinamika masyarakat yang berdampak pada tuntutan akan penyediaan layanan oleh pemerintah yang semakin berkualitas, melalui pelaksanaan evaluasi kinerja yang digunakan secara periodik akan membantu sebuah organisasi dalam hal ini Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir.

1. Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Koperasi

Sasaran strategis meningkatkan kualitas koperasi terdiri dari dua indikator tujuan/sasaran yaitu persentase jumlah koperasi sehat dan jumlah koperasi aktif. Jumlah koperasi di Rokan Hilir tahun 2023 sebanyak 494 unit bertambah sebanyak 26 unit dari tahun 2022 sebanyak 468 unit. Terdiri dari 443 unit koperasi aktif dan sebanyak 51 unit melaksanakan RAT. Koperasi tidak aktif tahun 2023 berjumlah 51 unit. Target persentase koperasi sehat tahun 2023 sebesar 7,99% dan terealisasi pada tahun 2023 sebesar 6,48%.

Menurunnya koperasi sehat tahun 2023 dipengaruhi oleh minimnya anggaran yang tersedia dalam pengawasan penilaian kesehatan koperasi, sedangkan persentase koperasi aktif dengan target 79,71% pada tahun 2023 dan terealisasi sebesar 89,68%. Maka persentase antara realiasi dan target untuk koperasi aktif sebesar 100%.

Tabel III.2 Sasaran Strategis 1 UMKM Kabupaten Rokan Hilir.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	%
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	7,99%	6,48%	81,10%
		Persentase Koperasi Aktif	79,71%	89,68%	100%

Tabel III.3 Capaian Kinerja Strategis 1 Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Dibandingkan dengan Realisasi Tahun – Tahun Sebelumnya.

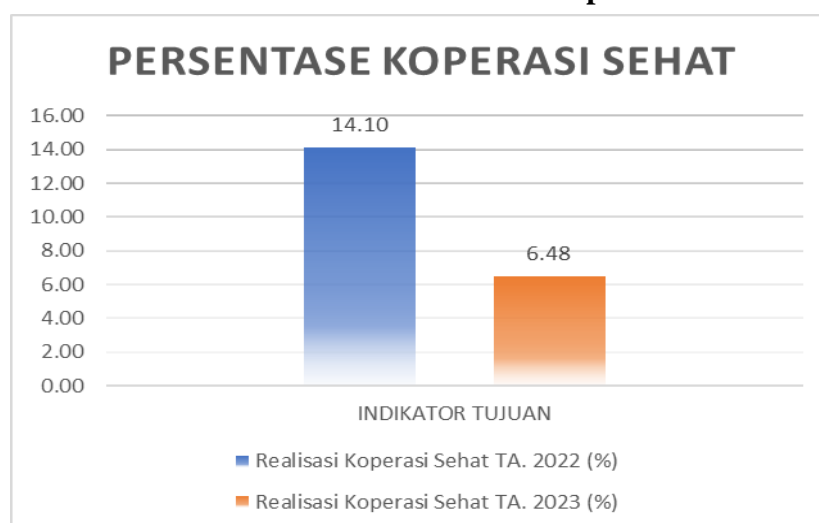
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	CAPAIAN %		
			2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	66,61%	100%	81,10%
		Persentase Koperasi Aktif	n/a	100%	100%

Tabel III.4 Capaian Kinerja Strategis 1 Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Dibandingkan Target Akhir Periode Rencana Strategis.

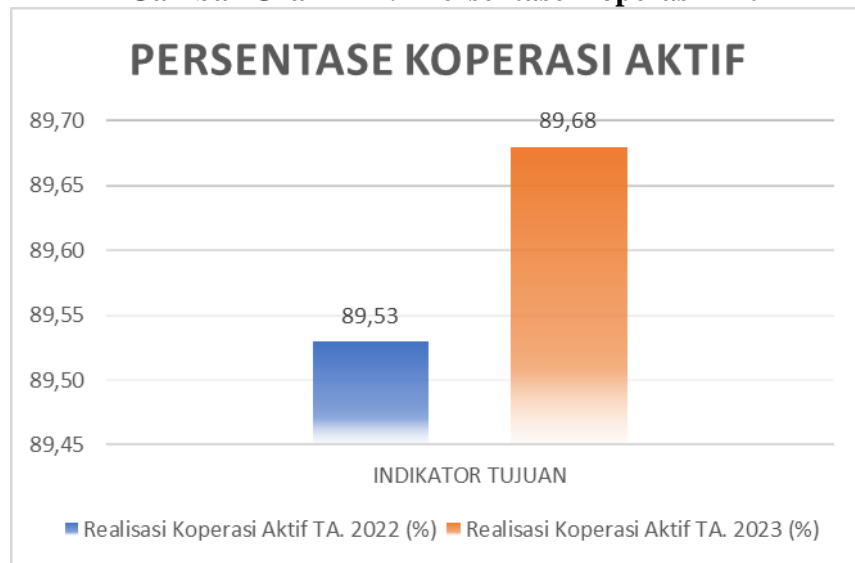
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2023	%
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	9,68%	6,48%	66,94%
		Persentase Koperasi Aktif	85,50%	89,68%	100%

Grafik perbandingan antara realiasi persentase koperasi sehat tahun 2022 dan realisasi persentase koperasi sehat tahun 2023, sebagai berikut :

Gambar Grafik III.1 Persentase Koperasi Sehat



Gambar Grafik III.2 Persentase Koperasi Aktif



Berdasarkan grafik persentase koperasi sehat terjadi penurunan realisasi persentase koperasi sehat dikarena kurangnya anggaran pendukung untuk melakukan pengawasan dan pembinaan koperasi. Sedangkan untuk grafik persentase koperasi aktif terjadi peningkatan realisasi yang disebabkan meningkatnya pembentukan koperasi baru di Kabupaten Rokan Hilir, selaras dengan hal tersebut makanya terjadi pula peningkatan koperasi aktif di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023.

2. Sasaran Strategis Meningkatkan Produktivitas Koperasi

Sasaran strategis meningkatkan produktivitas koperasi dengan indikator tujuan/sasaran jumlah pertumbuhan omzet usaha. Dapat diuraikan bahwa pertumbuhan omzet usaha koperasi seiring dengan penambahan jumlah koperasi di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 sebanyak 494 unit bertambah 26 unit dari tahun 2022 sebanyak 468 unit. Terdiri dari 443 unit koperasi aktif dan koperasi tidak aktif tahun 2023 berjumlah 51 unit.

Target omzet usaha/volume usaha pada tahun 2023 sebesar Rp. 147.000.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 186.531.077.600,- dengan peningkatan sebesar Rp 39.531.077.600,- dari target. Dengan demikian, maka pertumbuhan omzet usaha koperasi pada tahun 2023 sebesar 100 %.

Tabel III.5 Sasaran Strategis 2 UMKM Kabupaten Rokan Hilir.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	%
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Jumlah Pertumbuhan omzet Usaha (Rupiah)	147 M	186.531.077.600	100%

Tabel III.6 Capaian Kinerja Strategis 2 Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Dibandingkan dengan Realisasi Tahun – Tahun Sebelumnya.

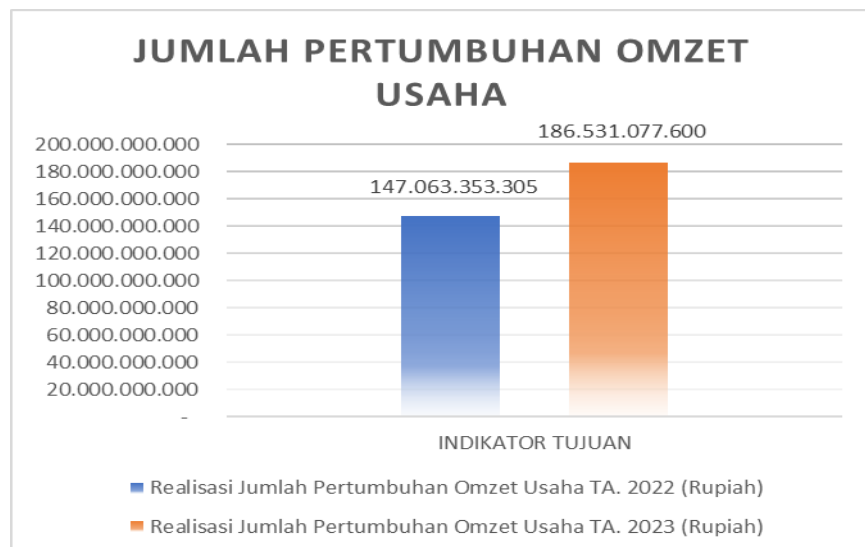
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	CAPAIAN %		
			2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	66,61%	100%	81,10%

Tabel III.7 Sasaran Strategis 2 Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Dibandingkan Target Akhir Periode Rencana Strategis Kabupaten Rokan Hilir.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2023	%
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Jumlah Pertumbuhan omzet Usaha (Rupiah)	160 M	186.531.077.600	100%

Grafik perbandingan antara realiasi persentase koperasi sehat tahun 2022 dan realisasi persentase koperasi sehat tahun 2023 mengalami penurunan disebabkan minimnya anggaran yang mendukung untuk tercapainya sasaran dari indikator tujuan tersebut, berikut grafiknya antara lain :

Gambar Grafik III.3 Jumlah Pertumbuhan Omzet Usaha



3. Sasaran Strategis Meningkatnya UMKM yang Berdaya Saing.

Untuk sasaran strategis meningkatkan UMKM yang berdaya saing dengan indikator tujuan/sasaran yakni jumlah UMKM yang mempunyai legalitas dan sertifikat setiap tahunnya dengan target kinerja sebanyak 70 unit untuk tahun 2023. Berdasarkan dari data base UMKM Kabupaten Rokan Hilir tahun 2023 jumlah UMKM yang mempunyai legalitas dan sertifikat sebanyak 87 unit (100%) dengan peningkatan sebanyak 17 unit dari target. Dari kinerja ini dapat dilihat bahwa berkembangnya jumlah UMKM dari tahun ke tahun di Kabupaten Rokan Hilir cukup meningkat, hal ini ditandai dengan meningkatnya aktifitas ekonomi. Sedangkan untuk indikator tujuan/sasaran jumlah UMKM dengan target pada tahun 2023 sebesar 25.003 unit. Realisasi untuk tahun 2023 jumlah UMKM di Kabupaten Rokan Hilir sebanyak 35.068 unit. Meningkat sebanyak 10.065 unit dari target (100%).

Tabel III.8 Sasaran Strategis 3 UMKM Kabupaten Rokan Hilir.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	%
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya UMKM yang Bedaya Saing	Jumlah UMKM yang mempunyai legalitas dan sertifikat setiap tahunnya (Unit)	70	87	100%
		Jumlah UMKM (Unit)	25.003	35.068	100%

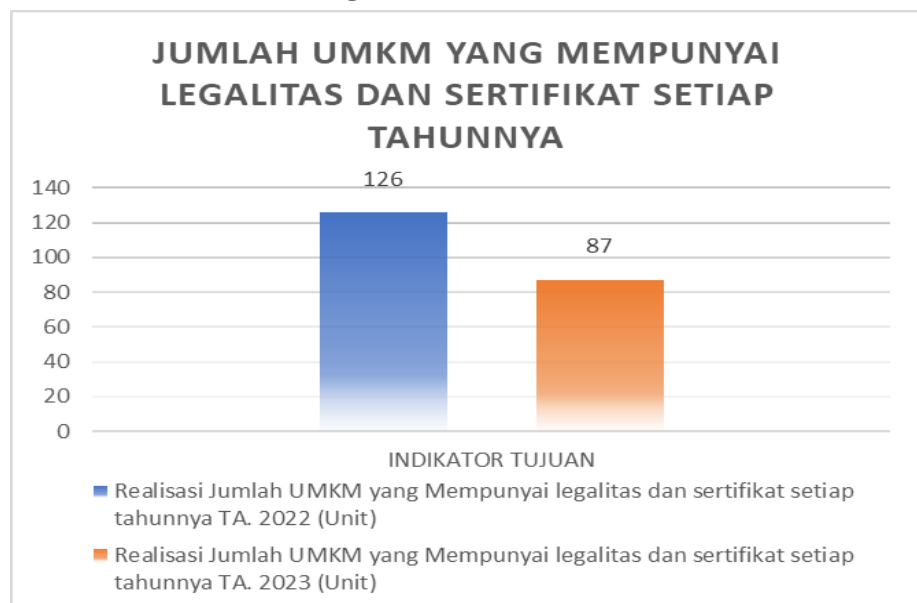
Tabel III.9 Capaian Kinerja Strategis 3 Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Dibandingkan dengan Realisasi Tahun – Tahun Sebelumnya.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	CAPAIAN %		
			2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya UMKM yang Bedaya Saing	Jumlah UMKM yang mempunyai legalitas dan sertifikat setiap tahunnya (Unit)	n/a	100%	100%
		Jumlah UMKM (Unit)	n/a	100%	100%

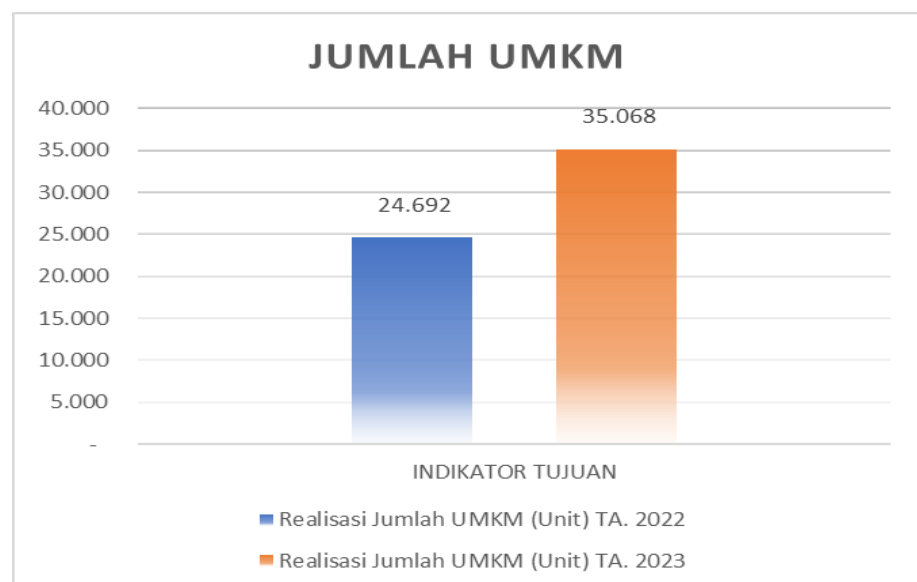
Tabel III.10 Capaian Kinerja Strategis 3 Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Dibandingkan Target Akhir Periode Rencana Strategis.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2023	%
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya UMKM yang Bedaya Saing	Jumlah UMKM yang mempunyai legalitas dan sertifikat setiap tahunnya (Unit)	80	87	100%
		Jumlah UMKM (Unit)	28.003	35.068	100%

Gambar Grafik III.4 Jumlah UMKM Yang Mempunyai Legalitas dan Sertifikat



Gambar Grafik III.5 Jumlah UMKM



Berdasarkan grafik jumlah UMKM yang mempunyai legalitas dan sertifikat yang disajikan, dapat diketahui bahwa terjadi penurunan jumlah UMKM yang memiliki legalitas dan sertifikat disebabkan minimnya dukungan anggaran yang tersedia di Dinas Koperasi dan UMKM. Sedangkan untuk grafik jumlah UMKM terjadi peningkatan karena meningkatnya jumlah pelaku usaha yang membuka usaha baru dan mengurus izin sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, tetapi semakin tingginya jumlah UMKM tidak diseras dengan anggaran yang diberikan kepada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023.

4. Sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas KUMKM

Sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan indikator tujuan/sasaran yaitu Nilai AKIP OPD. Adapun laporan hasil Nilai AKIP OPD Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir tahun 2023 oleh Tim Evaluator Inpektorat Kabupaten Rokan Hilir mendapat nilai (70,83) dengan predikat BB.

Tabel III.11 Sasaran Strategis 4 UMKM Kabupaten Rokan Hilir

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	%
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP OPD	BB	BB	100%

Tabel III.12 Capaian Kinerja Strategis 4 Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Dibandingkan dengan Realisasi Tahun – Tahun Sebelumnya.

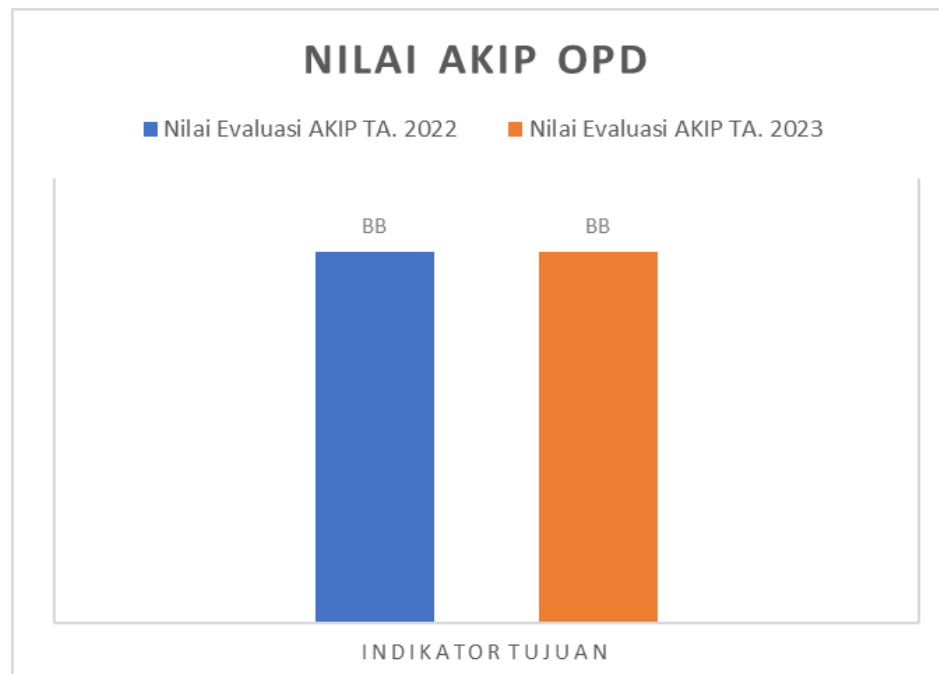
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	CAPAIAN %		
			2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP OPD	92,61%	100%	100%

Tabel III.13 Sasaran Strategis 4 Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Dibandingkan Target Akhir Periode Rencana Strategis Kabupaten Rokan Hilir.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2023	%
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP OPD	A	BB	88,54%

Grafik Nilai AKIP OPD Tahun 2023 mendapatkan nilai “BB” sama seperti Nilai AKIP OPD Tahun 2022, tetapi mengalami peningkatan nilai dari 70,56% menjadi 70,83%.

Gambar Grafik III.6 Nilai AKIP OPD



Pengukuran kinerja masing-masing sasaran dan kegiatan untuk capaian akhir indikator dan realisasi pencapaiannya dapat dilihat pada Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (Lampiran I). Adapun rencana dan capaian target indikator kinerja dapat dilihat pada Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (Lampiran II).

C. Realisasi Anggaran

Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir pada tahun anggaran 2023 mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 6.167.823.496,- pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir. Pada APBD-P terjadi penambahan anggaran, sehingga menjadi Rp. 6.445.223.496,-. Untuk realisasi anggaran sebesar Rp. 6.214.775.991,- (96,42%) . Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah :

Tabel III.8 Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023.

Uraian	Anggaran		Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	% Realisasi
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
1	2	3	4	5	6
Belanja	6.167.823.496	6.445.223.496	6.214.775.991	230.447.505	96,42

Tabel III.9 Anggaran dan Realisasi Belanja Per-Program Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023.

No	Program	Jumlah (Rp)				Persentase
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Realisasi	Sisa (Rp)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	5.250.291.658	5.463.471.658	5.260.348.709	203.122.949	96,28
2	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAAN	667.445.132	643.365.132	629.964.552	13.400.580	97,92
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	250.086.706	250.086.706	236.327.730	13.758.976	94,50
4	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	-	88.300.000	88.135.000	165.000	99,81
Jumlah		6.167.823.496	6.445.223.496	6.214.775.991	230.447.505	96,42

Tabel III.10 Anggaran dan Realisasi Belanja Per- Kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023.

No	Kegiatan	Jumlah (Rp)				Persentase
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Realisasi	Sisa (Rp)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	125,999,389	125,999,389	125,125,389	874,000	99.31%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,318,288,672	3,395,703,232	3,275,939,883	119,763,349	96.47%
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	240,541,777	277,177,777	258,982,413	18,135,364	93.46%
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	734,609,938	818,071,394	805,762,495	12,308,899	98.50%
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	94,747,986	178,167,362	172,222,000	5,945,362	96.66%
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	401.614.896	410,623,504	379,244,241	31,379,263	92.36%
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	334,489,000	257,789,000	243,072,288	14,716,712	94.29%
8	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	298,075,132	273,995,132	273,995,132	0	100%
9	Pendidikan dan PeLatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	369,370,000	369,370,000	355,969,420	13,400,580	96.37%
10	Peremberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	250,086,706	250,086,706	236,327,730	13,758,976	94.50%
11	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	-	88,300,000	88,135,000	165,000	99.81%
Jumlah		6.167.823.496	6.445.223.496	6.214.775.991	230.447.505	96,42

Dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir tahun anggaran 2023 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- *Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.* Sub kegiatan ini memiliki Indikator hasil sub kegiatan yaitu Laporan RENJA Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir tahun 2023. Pada tahun 2023 anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 19.999.816,- dan terealisasi sebesar Rp. 19.125.389,- (99,31%) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 874.000,-.
- *Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.* Sub kegiatan ini dilaksanakan untuk menyusun dokumen RKA dengan Indikator hasil yaitu Laporan RKA Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir tahun 2023. Anggaran untuk sub kegiatan tahun 2023 sebesar Rp. 27.999.982,- dan terealisasi sebesar Rp. 27.999.982,- (100%).
- *Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKPA-SKPD.* Sub kegiatan ini dilaksanakan untuk menyediakan perubahan dokumen RKPA. Indikator hasil sub kegiatan ini adalah Laporan Perubahan RKPA Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir tahun 2023. Pada tahun 2023 anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 17.999.868,- dan terealisasi sebesar Rp. 17.999.868,- (100%).
- *Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD.* Sub kegiatan ini dilaksanakan untuk menyediakan dokumen DPA SKPD. Indikator hasil sub kegiatan ini adalah LaporanP DPA SKPD Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir tahun 2023. Pada tahun 2023 anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 9.999.888,- dan terealisasi sebesar Rp. 9.999.888,- (100%).
- *Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen DPPA-SKPD.* Sub kegiatan ini dilaksanakan untuk menyediakan dokumen perubahan DPPA SKPD. Indikator hasil sub kegiatan ini adalah Laporan Perubahan DPPA SKPD Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir tahun 2023.

Pada tahun 2023 anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 9.999.888,- dan terealisasi sebesar Rp. 9.999.888,- (100%).

- *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.* Indikator kinerja dari sub kegiatan ini adalah adanya laporan LAKIP, LPPD, LKPJ Dinas Koperasi dan UMKM tahun 2023. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 19.999.957,- dengan realisasi sebesar Rp. 19.999.957,- (100%).
- *Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.* Indikator hasil sub kegiatan ini adalah terselenggaranya evaluasi dan monitoring program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir tahun 2023 dengan anggaran sebesar Rp. 19.999.990,- dan terealisasi sebesar Rp. 19.999.990,- (100%).

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- *Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.* Hasil dari sub kegiatan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan gaji dan tunjangan ASN Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir tahun 2023. Pada tahun 2023 anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 3.371.559.378,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.251.796.029,- (96,45%) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 119,763,349,-.
- *Koordinasi dan Penyusunan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.* Sub kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka penyusunan laporan keuangan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir selama 1 (satu) tahun. Adapun indikator sub kegiatan adalah Laporan keuangan tahun 2023. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 15.934.157,- dan terealisasi sebesar Rp. 15.934.157,- (100%).
- *Koordinasi dan Penyusunan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD.* Sub Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka penyusunan laporan keuangan semesteran Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir. Adapun indikator sub kegiatan ini adalah Laporan Keuangan Semesteran SKPD Tahun 2023. Anggaran

sebesar Rp. 8.209.697,- dan terealisasi sebesar Rp. 8.209.697,- (100%).

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- *Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.* Indikator hasil sub kegiatan ini adalah pakaian seragam olahraga, PDH Khaki dan Pakaian Melayu untuk ASN Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2023 dengan anggaran sebesar Rp. 126.971.777,- dan terealisasi sebesar Rp. 126.971.777,- (100%).
- *Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.* Pada tahun 2023 anggaran yang tersedia sebesar Rp. 150.146.000,- dengan target kinerja jumlah pegawai yang mengikuti diklat formal/pengembangan wawasan berdasarkan tugas dan fungsi dengan realisasi sebesar Rp. 132.010.636,- (87,92%). Adapun sisa anggaran sebesar Rp. 18.135.364,-.

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- *Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.* Dari sub kegiatan ini hasil yang diperoleh adalah peningkatan kualitas pelayanan kantor khusus pada instalasi listrik/penerangan. Untuk sub kegiatan ini jumlah anggaran pada tahun 2023 sebesar 33.748.298,-. Sub kegiatan ini terealisasi sebesar Rp 32.810.443,- (97,22%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 937.855,-.
- *Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.* Indikator hasil sub kegiatan ini adalah tersedianya alat tulis kantor Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir tahun 2023. Jumlah anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 83.477.303,-. Realisasi anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 80.753.911,- (96,74%) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 2.723.392,-.
- *Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.* Indikator hasil sub kegiatan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan peralatan rumah tangga pada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir tahun 2023. Untuk anggaran pada tahun 2023 sebesar Rp. 24.764.229,-. Sub kegiatan ini

- teralisasi sebesar Rp. 24.350.634,- (98,33%) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 413.595,-.
- *Penyediaan Bahan Logistik Kantor.* Dari sub kegiatan ini hasil yang diperoleh adalah tersedianya kebutuhan makanan dan minuman rapat rutin dan tamu Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir tahun 2023. Jumlah anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 32.536.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 32.536.800,- (100%).
 - *Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.* Target kinerja sub kegiatan ini adalah tersedianya barang cetakan dan penggandaan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir tahun 2023. Untuk sub kegiatan ini hasil yang diperoleh adalah terpenuhinya keperluan atas barang cetakan dan penggandaan. Untuk tahun 2023 sub kegiatan ini dengan anggaran sebesar Rp. 67.519.764,-. Sub kegiatan ini sudah dilaksanakan dengan realiasi sebesar Rp. 60.262.435,- (89,25%). Sisa anggaran dari sub kegiatan ini sebesar Rp. 7.257.329,-.
 - *Penyediaan Bahan / Material.* Dari sub kegiatan ini hasil yang diperoleh adalah tersedianya kebutuhan bahan / material, miniatur dan lainnya di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir tahun 2023. Jumlah anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 33.300.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 32.415.000,- (97,34%) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 885.000,-.
 - *Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.* Dari sub kegiatan ini hasil yang diperoleh adalah terselenggaranya koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah. Dengan terget kinerja Jumlah pegawai Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir yang melakukan perjalanan dinas kedalam dan luar daerah tahun 2023. Jumlah anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 542.725.000,- Realisasi anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 542.633.272,- (99,98%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 91.728,-.

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- *Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.* Dari sub kegiatan ini hasil yang diperoleh adalah tersedianya peralatan dan mesin lainnya di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir tahun 2023. Jumlah anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 113.565.362,-. Realisasi pada tahun ini sebesar Rp. 107.620.000,- (94,76%) dan sisa anggaran dari sub kegiatan ini sejumlah Rp. 5.945.362,-.
- *Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.* Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir tahun 2023. Untuk anggarannya sebesar Rp. 64.602.000,-. Realisasi kegiatan sebesar Rp 64.602.000,-. (100%).

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- *Penyediaan Jasa Surat Menyurat.* Dari sub kegiatan ini hasil yang diperoleh adalah terjadinya komunikasi yang baik dengan instansi vertikal maupun horizontal tahun 2023. Jumlah anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 7.000.000,-. Realisasi pada tahun ini sebesar Rp. 7.000.000,- (100%).
- *Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.* Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah pembayaran biaya wifi, air dan listrik Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir tahun 2023. Untuk anggarannya sebesar Rp. 86.038.608,-. Realisasi pada tahun ini sebesar Rp 68.613.441,- (79,75%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 17.425.167,-.
- *Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.* Dari sub kegiatan ini hasil yang diperoleh adalah tersedianya tenaga cleaning service, penjaga malam, dan tenaga sopir untuk menunjang tugas Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir tahun 2023. Anggarannya sebesar Rp. 317.584.896,-. Realisasi sub kegiatan ini adalah Rp. 303.630.800,- (95,61%) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 13.954.096,-.

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.* Dengan indikator kinerja hasil adalah terselenggaranya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas jabatan tahun 2023 dan dianggarkan sebesar Rp. 46.530.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 41.286.663,- (88,73%). Sisa anggaran dari sub kegiatan ini sebesar Rp. 5.243.337,-
- *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.* Dengan indikator kinerja hasil adalah terselenggaranya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan tahun 2023 dan dianggarkan sebesar Rp. 66.870.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 60.077.325,- (89,84%). Sisa anggaran dari sub kegiatan ini sebesar Rp. 6.792.675,-.
- *Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.* Indikator kinerja hasil yaitu terpeliharanya peralatan kantor. Pada tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp. 34.620.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 34.107.900,- (98,52%). Adapun sisa anggaran sebesar Rp. 512.100,-.
- *Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.* Adapun tujuan pada sub kegiatan ini adalah untuk terpeliharanya gedung kantor atau bangunan kantor lainnya dengan anggaran yang tersedia pada tahun 2023 sebesar Rp. 109.769.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 107.600.400,- (98,02%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 2.168.600,-.

2. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

a. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten / Kota

- *Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi.* Tujuan pada sub kegiatan ini adalah melakukan koordinasi kepada pendamping koperasi dilapangan untuk mengetahui perkembangan koperasi.

Anggaran pada sub kegiatan sebesar Rp. 273.995.132,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 273.995.132,- (100 %).

b. Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota.

- *Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro (DAK Non Fisik PK2UKM).* Sub kegiatan ini bertujuan untuk melatih pengurus/pengelola koperasi dan pelaku UMKM agar memiliki pengetahuan dan keterampilan. Anggaran pada tahun 2023 sebesar Rp. 369.370.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 355.969.420,- (96,37%) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 13.400.580,-.

3. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)

a. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan

- *Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro.* Tujuan pada sub kegiatan ini adalah melakukan pembinaan dan bantuan alat usaha kepada pelaku usaha di wilayah Kabupaten Rokan Hilir. Anggaran pada sub kegiatan sebesar Rp. 250.086.706,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 236.327.730,- (94,50%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 13.758.976,-.

4. Program Pengembangan UMKM

a. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Usaha Mikro

- *Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi.* Tujuan pada sub kegiatan ini adalah melakukan promosi dan pemasaran dari produk - pelaku usaha Kabupaten Rokan Hilir. Anggaran pada sub kegiatan sebesar Rp. 88.300.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 88.135.000,- (99,81%), dengan sisa anggaran sebesar Rp. 165.000,-.

Tabel I.5 Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023

URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			JUMLAH (Rp)				PERSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
			ANGGARAN		REALISASI	SISA DANA	
PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN			
1	2	3	4	5	6	7	8
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			5,250,291,658	5,463,471,658	5,260,348,709	203,122,949	96,28
	Perencanaan, Penggabungan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		125,999,389	125,999,389	125,125,389	874,000	99,31
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19,999,816	19,999,816	19,125,816	874.000	95.63
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	27,999,982	27,999,982	27,999,982	-	100
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	17,999,868	17,999,868	17,999,868	-	100
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	9,999,888	9,999,888	9,999,888	-	100
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD	9,999,888	9,999,888	9,999,888	-	100
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan dan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19,999,957	19,999,957	19,999,957	-	100
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19,999,990	19,999,990	19,999,990	-	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		3,318,288,672	3,395,703,232	3,275,939,883	119,763,349	96,47
		Penyediaan Gajidan Tunjangan ASN	3,294,144,818	3,371,559,378	3,251,796,029	119,763,349	96.45
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	15,934,157	15,934,157	15,934,157	-	100
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	8,209,697	8,209,697	8,209,697	-	100
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		240,541,777	277,117,777	258,982,413	18,135,364	93,46
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	126,971,777	126,971,777	126,971,777	-	100
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	113,570,000	150,146,000	132,010,636	-18,135,364	87.92
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		734,609,938	818,071,394	805,762,495	37,873,880	94,45
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	33,748,298	33,748,298	32,810,443	937,855	99.53

URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			JUMLAH (Rp)				PERSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
			ANGGARAN		REALISASI	SISA DANA	
PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN			
1	2	3	4	5	6	7	8
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	83,477,303	83,477,303	80,753,911	2,723,392	79.08
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	24,764,229	24,764,229	24,350,634	413,595	82.81
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	48,436,800	32,536,800	32,536,800	-	100
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	67,519,764	67,519,764	60,262,435	7,257,329	89.25
		Penyediaan Bahan/Material	65,967,544	33,300,000	32,415,000	885,000	97.34
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	410,696,000	542,725,000	542,633,272	91,728	99.98
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		94,747,986	178,167,362	172,222,000	5,945,362	96.66
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	94,747,986	113,565,362	107,620,000	5,945,362	94.76
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	64,602,000	64,602,000	-	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		401,614,896	410,623,504	379,244,241	31,379,263	92.36
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9,990,000	7,000,000	7,000,000	-	100
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	86,040,000	86,038,608	68,613,441	17,425,167	79.75
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	305,584,896	317,584,896	303,630,800	13,954,096	95.61
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		334,489,000	257,789,000	243,072,288	14,716,712	94.29
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	66,530,000	46,530,000	41,286,663	5,245,337	88.73
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	123,570,000	66,870,000	60,077,325	6,792,675	89.84
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34,620,000	34,620,000	34,107,900	512,100	98.52
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	109,769,000	109,769,000	107,600,400	2,168,600	98.02

URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			JUMLAH (Rp)				PERSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
			ANGGARAN		REALISASI	SISA DANA	
PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN			
1	2	3	4	5	6	7	8
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAAN			667,445,132	643,365,132	629,964,552	13,400,580	97.92
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasiasaan Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		298,075,132	273,995,132	273,995,132	-	100
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasiasaan serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	298,075,132	273,995,132	273,995,132	-	100
	Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		369,370,000	369,370,000	355,969,420	13,400,580	96.37
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	369,370,000	369,370,000	355,969,420	13,400,580	96.37
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			250,086,706	250,086,706	236,327,730	13,758,976	94.50
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		250,086,706	250,086,706	236,327,730	13,758,976	94.50
		Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	250,086,706	250,086,706	236,327,730	13,758,976	94.50
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			-	88,300,000	88,135,000	165,000	99.81
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		-	88,300,000	88,135,000	165,000	99.81
		Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	-	88,300,000	88,135,000	165,000	99.81
Jumlah			6.167.823.496	6.445.223.496	6.214.775.991	230.447.505	96.42

BAB IV

PENUTUP

Sepanjang tahun anggaran 2023 sebagian besar kegiatan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir telah berhasil dilaksanakan secara maksimal, namun masih ada beberapa kegiatan yang telah diprogramkan dan dianggarkan tetapi harus dikurangi karena terjadinya efisiensi. Anggaran yang tersedia telah dapat dikelola sebaik mungkin melalui kegiatan yang ada, supaya fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam menyelenggarakan urusan penunjang di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Demikianlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir kami susun sekiranya dapat dimanfaatkan sebagai dasar pengukuran kinerja SKPD Tahun Anggaran 2023.

Bagansiapiapi, Februari 2024

KEPALA DINAS KOPERASI DAN UMKM
KABUPATEN ROKAN HILIR,



**PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

KABUPATEN : ROKAN HILIR
NAMA SKPD : DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

KODE	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			TARGET KINERJA (KUALITATIF)	JUMLAH (Rp)				PERSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	KET
					ANGGARAN		REALISASI	SISA DANA		
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			100%	5,250,291,658	5,463,471,658	5,260,348,709	203,122,949	96.28	
2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	125,999,389	125,999,389	125,125,389	874,000	99.31	
02			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Bulan	19,999,816	19,999,816	19,125,816	874,000	95.63	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12 Bulan	27,999,982	27,999,982	27,999,982	-	100	
03			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	12 Bulan	17,999,868	17,999,868	17,999,868	-	100	
04			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	12 Bulan	9,999,888	9,999,888	9,999,888	-	100	
05			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD	12 Bulan	9,999,888	9,999,888	9,999,888	-	100	

06			Koordinasi dan Penyusunan Laporan dan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Bulan	19,999,957	19,999,957	19,999,957	-	100	
07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 bulan	19,999,990	19,999,990	19,999,990	-	100	
2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	3,318,288,672	3,395,703,232	3,275,939,883	119,763,349	96.47	
01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	3,294,144,818	3,371,559,378	3,251,796,029	119,763,349	96.45	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Bulan	15,934,157	15,934,157	15,934,157	-	100	
05			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Bulan	8,209,697	8,209,697	8,209,697	1,378,372	100	
2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	240,541,777	277,117,777	258,982,413	18,135,364	93.46	
02			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	12 Bulan	126,971,777	126,971,777	126,971,777	-	100	
09			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	12 Bulan	113,570,000	150,146,000	132,010,636	18,135,364	87.92	
2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	734,609,938	818,071,394	805,762,495	12,308,899	98.50	
01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	33,748,298	33,748,298	32,810,443	937,855	97.22	
02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	83,477,303	83,477,303	80,753,911	2,723,392	96.74	
03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 Bulan	24,764,229	24,764,229	24,350,634	413,595	98.33	

04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	48,436,800	32,536,800	32,536,800	-	100	
05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	67,519,764	67,519,764	60,262,435	7,257,329	89.25	
			Penyediaan Bahan/Material	12 Bulan	65,967,544	33,300,000	32,415,000	885,000	97.34	
09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	410,696,000	542,725,000	542,633,272	91,728	99.98	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	94,747,986	178,167,362	172,222,000	5,945,362	96.66	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan	94,747,986	113,565,362	107,620,000	5,945,362	94.76	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 Bulan	-	64,602,000	64,602,000	-	100	
2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	401,614,896	410,623,504	379,244,241	31,379,263	92.36	
01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	9,990,000	7,000,000	7,000,000	-	100	
02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	86,040,000	86,038,608	68,613,441	17,425,167	79.75	
04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	305,584,896	317,584,896	303,630,800	13,954,096	95.61	
2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	334,489,000	257,789,000	243,072,288	14,716,712	94.29	
01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 Bulan	66,530,000	46,530,000	41,286,663	5,243,337	88.73	

02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Bulan	123,570,000	66,870,000	60,077,325	6,792,675	89.84	
06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan	34,620,000	34,620,000	34,107,900	512,100	98.52	
11			Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 Bulan	109,769,000	109,769,000	107,600,400	2,168,600	98.02	
05.	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAAN			100%	667,445,132	643,365,132	629,964,552	13,400,580	97.92	
2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasiaan Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		12 Bulan	298,075,132	273,995,132	273,995,132	-	100	
01			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasiaan serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	12 Bulan	298,075,132	273,995,132	273,995,132	-	100	
2.03		Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		100 Orang	369,370,000	369,370,000	355,969,420	13,400,580	96.37	
01			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	100 Orang	369,370,000	369,370,000	355,969,420	13,400,580	96.37	
05.	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			100%	250,086,706	250,086,706	236,327,730	13,758,976	94.50	
2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		12 Bulan	250,086,706	250,086,706	236,327,730	13,758,976	94.50	

01			Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	12 Bulan	250,086,706	250,086,706	236,327,730	13,758,976	94,50	
05.	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			100%	-	88,300,000	88,300,000	165,000	99,81	
2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		12 Bulan	-	88,300,000	88,300,000	165,000	99,81	
01			Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	12 Bulan	-	88,300,000	88,135,000	165,000	99,81	
JUMLAH BELANJA					6.167.823.496	6.445.223.496	6.214.775.991	230,447,505	96,42	

Bagansiapiapi, Februari 2024

KEPALA DINAS KOPERASI DAN UMKM
KABUPATEN ROKAN HILIR,



**PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

KABUPATEN : ROKAN HILIR
NAMA OPD : DINAS KOPERASI DAN UMKM

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	7.99%	6,48%	81.10%
		Persentase Koperasi Aktif	79.71%	89,68%	100%
2	Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Jumlah Pertumbuhan Omzet Usaha (Rupiah)	Rp. 147 M	Rp. 186.531.077.600	100%
3	Meningkatnya UMKM yang Berdaya Saing	Jumlah UMKM yang Mempunyai legalitas dan sertifikat setiap tahunnya (Unit)	70	87	100%
		Jumlah UMKM (Unit)	25.003	35.068	100%
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP OPD	BB	BB	100%

Jumlah anggaran tahun 2023 (setelah perubahan) : Rp. 6.445.223.496,-

Jumlah realisasi anggaran tahun 2023 : Rp. 6.214.775.991,-

Bagansiapiapi, Februari 2024

KEPALA DINAS KOPERASI DAN UMKM
KABUPATEN ROKAN HILIR,





PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

Jalan Arena MTQ Komplek Perkantoran Batu 6 Museum Ikan Lt. 2

Email : diskopukm@rohilkab.go.id

BAGANSIAPIAPI

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2023
DINAS KOPERASI DAN UMKM KABUPATEN ROKAN HILIR

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	7.99%
		Persentase Koperasi Aktif	79.71%
2.	Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Jumlah Omset Usaha (Rupiah)	Rp. 147 M
3.	Meningkatnya UMKM yang berdaya saing	Jumlah UMKM yang mempunyai Legalitas dan Sertifikat setiap tahunnya (Unit)	70 Unit
		Jumlah UMKM (Unit)	25.003 Unit
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP OPD	BB

Bagansiapiapi, 30 November 2023

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
DINAS KOPERASI DAN UMKM
SRI HASELINA, SH
Panglima Utama Muda (IV/C)
NIP. 19671125 199103 2 005

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS KOPERASI DAN UMKM KABUPATEN ROKAN HILIR**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	7.99%
		Persentase Koperasi Aktif	79.71%
2.	Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Jumlah Omzet Usaha (Rupiah)	Rp. 147 M
3.	Meningkatnya UMKM yang berdaya saing	Jumlah UMKM yang mempunyai Legalitas dan Sertifikat setiap tahunnya (Unit)	70 Unit
		Jumlah UMKM (Unit)	25.003 Unit
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP OPD	BB

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5,463,471,658	APBD P
2. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	643,365,132	APBD P/DAK
3. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha	250,086,706	APBD P
4. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	88,300,000	APBD P

Bagansiapiapi, 30 November 2023





PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

INSPEKTORAT

Komplek Perkantoran Batu 6 Jalan Lintas Pesisir Sungai Rokan Telp. (0767) 2700270 Fax. (0767) 2700271
KECAMATAN BANGKO - BAGANSIAPIPI

Nomor : 22/R/LHE/INSP/2023 Bagansiapiapi, 16 Agustus 2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) berkas
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) pada Dinas Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah Tahun 2023.

Yth. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah
Kabupaten Rokan Hilir
di-
Bagansiapiapi

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) pada Dinas Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah Tahun 2023.

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Sistem Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah Tahun 2023 yang merupakan hasil evaluasi APIP atas Implementasi SAKIP tahun 2022.

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Evaluasi

Dasar hukum pelaksanaan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai berikut :

- 1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pejanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Evaluasi Hasil Renja Tahun 2023
 TRIWULAN IV
 DINAS KOPERASI DAN UMKM


No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023/Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)	
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Semua Bidang																									
Sasaran Prioritas Daerah 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota (%)	100,00	538.980.000	100,00	-	100	5.483.471.658	488.725.431	1.599.624.858	1.451.103.543	1.720.894.877	5.280.348.709	0,00%	96,28%	100,00	5.280.348.709	975,98%							
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah (%)	-	0,00	100	125.999.389	20	14.209.816	20	-	20	57.999.827	40	52.915.746	100	125.125.389	100,00%	99,31%	100,00	125.125.389	0,00%	0,00%			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	-	0,00	1	19.999.816	1	14.209.816	-	-	-	-	4.916.000	1	19.125.816	100,00%	95,63%	1,00	19.125.816	0,00%	0,00%				
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun (Dokumen)	-	0,00	1	27.999.982	1	-	-	-	-	27.999.982	-	-	1	27.999.982	100,00%	100,00%	1,00	27.999.982	0,00%	0,00%			
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun (Dokumen)	-	0,00	1	17.999.888	-	-	-	-	-	1	17.999.888	1	17.999.888	100,00%	100,00%	1,00	17.999.888	0,00%	0,00%				
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun (Dokumen)	-	0,00	1	9.999.888	1	-	-	-	-	9.999.888	-	-	1	9.999.888	100,00%	100,00%	1,00	9.999.888	0,00%	0,00%			
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun (Dokumen)	-	0,00	1	9.999.888	-	-	-	-	-	1	9.999.888	1	9.999.888	100,00%	100,00%	1,00	9.999.888	0,00%	0,00%				
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun (Dokumen)	-	0,00	1	19.999.957	-	-	-	-	1	19.999.957	-	-	1	19.999.957	100,00%	100,00%	1,00	19.999.957	0,00%	0,00%			
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	-	0,00	1	19.999.990	-	-	-	-	-	1	19.999.990	1	19.999.990	100,00%	100,00%	1,00	19.999.990	0,00%	0,00%				
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	300,00	-	0,00	-	100	3.395.703.232	20	371.182.545	20	1.166.514.230	20	702.563.274	40	1.035.699.834	100	3.275.939.883	100,00%	96,47%	100,00	3.275.939.883	33,33%	0,00%	
	Penyelesaian Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang / bulan)	-	0,00	-	12	3.371.559.378	3	371.182.545	3	1.166.514.230	3	894.353.577	3	1.019.765.677	12	3.251.796.029	100,00%	96,45%	12,00	3.251.796.029	0,00%	0,00%		

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun BKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun BKPD yang disusun (Dokumen)			0,00		95	15.934.157	20		20		20		35	15.934.157	95	15.934.157	100,00%	100,00%	95,00	15.934.157	0,00%	0,00%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Berestren BKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/berestren BKPD yang disusun (Dokumen)			0,00		95	8.209.597	20		20		20		35	8.209.597	95	8.209.597	100,00%	100,00%	95,00	8.209.597	0,00%	0,00%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kualitas Administrasi Kepegawaian (%)	0,00	538.980.000	0,00		100	277.117.777	20		20	83.921.650	20	74.711.454	40	130.349.299	100	258.982.413	100,00%	93,48%	100,00	258.982.413	0,00%	127,36%
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Akibat Keanggotaannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Akibat Keanggotaan (Paket)		133.980.000	0,00		95	128.271.777	20		20	38.500.000	20	-	35	88.471.777	95	128.271.777	100,00%	100,00%	95,00	128.271.777	0,00%	24,77%
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)		405.000.000	0,00		12	150.148.000	3		3	25.421.650	3	74.711.454	3	31.877.522	12	132.010.838	100,00%	87,92%	12,00	132.010.838	0,00%	32,80%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase peningkatan Kualitas Administrasi Umum (%)			0,00		100	818.071.394	20	84.178.792	20	170.204.324	20	380.094.888	40	220.589.711	100	805.782.495	100,00%	98,50%	100,00	805.782.495	0,00%	0,00%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (%)			0,00		95	33.748.228	20		20	11.583.437	20	8.890.095	35	14.559.941	95	32.810.443	100,00%	97,22%	95,00	32.810.443	0,00%	0,00%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor (%)			0,00		95	83.477.303	20		20	31.414.885	20	27.187.592	35	22.151.874	95	80.783.911	100,00%	96,74%	95,00	80.783.911	0,00%	0,00%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase ketersediaan peralatan rumah tangga (%)			0,00		95	24.784.229	20		20	8.123.154	20	5.902.174	35	12.325.308	95	24.350.834	100,00%	98,33%	95,00	24.350.834	0,00%	0,00%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketersediaan bahan logistik kantor (%)			0,00		95	32.538.800	20	8.792.000	20	8.792.000	20	8.454.000	35	10.498.800	95	32.538.800	100,00%	100,00%	95,00	32.538.800	0,00%	0,00%
	Penyediaan Barang Detakan dan Penggantian	Persentase pemenuhan kebutuhan detakan dan/atau penggantian (%)			0,00		95	87.519.794	20		20	20.793.748	25	18.758.077	30	22.752.810	95	80.282.435	100,00%	92,25%	95,00	80.282.435	0,00%	0,00%
	Penyediaan Bahan/Utensil	Persentase ketersediaan bahan/materi (%)			0,00		95	33.300.000	20		20	-	20	32.415.000	35	-	95	32.415.000	100,00%	97,34%	95,00	32.415.000	0,00%	0,00%
	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi BKPD	Persentase pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi BKPD (%)			0,00		95	542.725.000	20	57.384.792	20	94.287.300	20	252.889.800	35	138.301.380	95	542.833.272	100,00%	99,98%	95,00	542.833.272	0,00%	0,00%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah (%)			0,00		95	178.187.302	20		20	-	20	83.200.000	35	89.022.000	95	172.222.000	100,00%	96,08%	95,00	172.222.000	0,00%	0,00%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan dan mesin lainnya (%)			0,00		95	113.595.392	20		40	-	80	83.200.000	95	24.420.000	95	107.620.000	100,00%	94,78%	95,00	107.620.000	0,00%	0,00%

	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya (%)			0,00		95	64.602.000	-	-	-	-	95	64.602.000	95	64.602.000	100,00%	100,00%	95,00	64.602.000	0,00%	0,00%		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)			0,00		100	410.623.504	20	39.176.276	20	182.882.386	20	45.163.910	40	132.021.687	100	379.244.241	100,00%	92,36%	100,00	379.244.241	0,00%	0,00%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketersediaan jasa surat menyurat (%)			0,00		95	7.000.000	20	-	40	2.000.000	60	2.000.000	95	3.000.000	95	7.000.000	100,00%	100,00%	95,00	7.000.000	0,00%	0,00%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)			0,00		95	86.038.608	20	15.046.678	40	16.104.786	60	19.034.310	95	18.427.667	95	68.613.441	100,00%	79,75%	95,00	68.613.441	0,00%	0,00%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketersediaan jasa pelayanan umum kantor (%)			0,00		95	317.534.896	20	24.129.600	40	144.777.600	60	24.129.600	95	110.594.000	95	303.630.800	100,00%	95,61%	95,00	303.630.800	0,00%	0,00%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik (%)			0,00		100	287.789.000	20	-	20	35.402.268	20	137.370.400	40	70.299.620	100	243.072.288	100,00%	94,25%	100,00	243.072.288	0,00%	0,00%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase kendaraan perorangan dinas atau jabatan yang dipelihara (%)			0,00		95	46.530.000	20	-	40	9.494.466	60	8.459.900	95	23.332.295	95	41.286.663	100,00%	86,73%	95,00	41.286.663	0,00%	0,00%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase kendaraan dinas operasional yang dipelihara (%)			0,00		95	66.870.000	20	-	40	12.835.000	60	12.365.000	95	34.877.325	95	60.077.325	100,00%	89,84%	95,00	60.077.325	0,00%	0,00%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pelaksanaan perbaikan peralatan kerja yang rusak ringan/bedang/berat (%)			0,00		95	34.620.000	25	-	50	13.072.800	70	8.945.100	95	12.090.000	95	34.107.900	100,00%	96,52%	95,00	34.107.900	0,00%	0,00%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang terlaksana pada tahun berjalan (%)			0,00		95	109.769.000	20	-	40	-	60	107.600.400	95	-	95	107.600.400	100,00%	98,02%	95,00	107.600.400	0,00%	0,00%
																		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100,00%	96,26%				
																			Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH																							
Sasaran Prioritas Daerah 1	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Terlaksananya kegiatan koperasi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan perkoperasian (%)	99,00		96,00		96	643.365.132	-	-	307.784.222	205.225.330	116.955.000	-	629.964.552	0,00%	97,92%	96,00	629.964.552	0,00%	0,00%			

	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM koperasi dalam pendidikan dan latihan koperasi (koperasi)			0,00	96	273.995.132	20	-	20	123.612.132	20	49.726.000	38	100.455.000	96	273.995.132	100,00%	100,00%	96,00	273.995.132	0,00%	0,00%
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang)			0,00	95	273.995.132	20	-	20	123.612.132	20	49.726.000	35	100.455.000	95	273.995.132	100,00%	100,00%	95,00	273.995.132	0,00%	0,00%
	Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Pelaku Usaha Mikro Yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dala 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota (%)			0,00	96	369.370.000	20	-	20	183.972.090	20	155.497.330	38	16.500.000	98	355.969.420	100,00%	96,37%	96,00	355.969.420	0,00%	0,00%
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDU Usaha Mikro	Persentase Jumlah Pelaku Usaha Mikro Yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan SDU Usaha Mikro dala 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota (%)			0,00	100	369.370.000	25	-	25	183.972.090	25	155.497.330	25	16.500.000	100	355.969.420	100,00%	96,37%	100,00	355.969.420	0,00%	0,00%
																		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100,00%	97,92%			
																			Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
Seseran Prioritas Daerah 1	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Meningkatnya Usaha Mikro Yang Menadi Wirusaha (%)	93,60		95,00	94	250.086.706	-	-	-	45.032.200	-	191.295.530	-	236.327.730	0,00%	94,50%	91,00	236.327.730	0,00%	0,00%		
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah usaha mikro yang mendapatkan akses bantuan permodalan (usaha mikro)			0,00	90	250.086.706	20	-	20	-	20	45.032.200	30	191.295.530	90	236.327.730	100,00%	94,50%	90,00	236.327.730	0,00%	0,00%
	Pemberdayaan Kelembagaan Rolensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembiayaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (Unit Usaha)			0,00	95	250.086.706	20	-	25	-	25	45.032.200	25	191.295.530	95	236.327.730	100,00%	94,50%	95,00	236.327.730	0,00%	0,00%
																			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100,00%	94,50%		
																			Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM						88.300.000	-	-	-	-	-	88.135.000		88.135.000					99,81%	88.135.000	0,00%	0,00%

	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil						88.300.000								88.135.000		88.135.000		99,81%		88.135.000		0,00%	
	Fasilitas Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produk dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah UMKM dalam lingkup kewirusahaan (UMKM)			0,00		95	88.300.000							95	88.135.000	95	88.135.000	100,00%	99,81%	95,00	88.135.000	0,00%	0,00%
																			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100,00%	99,81%			
																			Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			
							6.445.223.496	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM										100,00%	96,42%					
								PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					

Faktor pendorong keberhasilan pencapaian kinerja :		
Faktor penghambat pencapaian kinerja :		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam trivuln berikutnya*):		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya*):		

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN ROKAN HILIR
 NOMOR : 18 /SK/K.UMKM/2023
 TENTANG : PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOPERASI DAN UMKM KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2021-2026

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA	KONDISI KINERJA AWAL TAHUN 2021	TARGET KINERJA PADA TAHUN SASARAN					
						2022	2023	2024	2025	2026	Target Kinerja Akhir Periode
1	Terwujudnya Koperasi yang Maju dan Modern	Meningkatnya kualitas koperasi	Presentase koperasi sehat	$\frac{\text{Jumlah koperasi sehat}}{\text{Jumlah seluruh koperasi}} \times 100\%$	n/a	7.74%	7.99%	8.47%	8.95%	9.68%	9.68%
			Presentase Koperasi aktif	$\frac{\text{Jumlah koperasi aktif}}{\text{Jumlah seluruh koperasi}} \times 100\%$	n/a	78.54%	79.71%	81.39%	83.33%	85.50%	85.50%
		Meningkatnya produktivitas koperasi	Jumlah omzet usaha (Rupiah)	Jumlah omzet usaha per tahun	Rp. 140 M	Rp. 145 M	Rp. 147 M	Rp. 151 M	Rp. 158 M	Rp. 160 M	Rp. 160 M
2	Terwujudnya UMKM Berdaya Saing Global	Meningkatnya UMKM yang berdaya saing	Presentase peningkatan UMKM yang mempunyai legalitas dan sertifikat setiap tahunnya (Unit)	$\frac{\text{Jumlah UMKM yang memiliki sertifikat tahun berjalan}}{\text{Jumlah UMKM yang memiliki sertifikat tahun sebelumnya}} \times 100\%$	60	65	70	72	75	80	80
			Jumlah UMKM (Unit)	Jumlah UMKM per tahun	23.003	24.003	25.003	26.003	27.003	28.003	28.003
3	Meningkatkan Penyelenggaraan Daerah yang Bersih, Transparan dan Akuntabel	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP OPD	Hasil Evaluasi AKIP oleh Inspektorat	B	BB	BB	BB	BB	A	A

KEPALA DINAS KOPERASI DAN UMKM
 KABUPATEN ROKAN HILIR



SRI HASLINA, SH

Pembina Tk. I

NIP. 19671125 199103 2 005